



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA

**UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERLINA HIDAYATI SUMARDI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 182868

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.595.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 537 m2/96 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 595.000.000
2. Tanah Seluas 1.580 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 2.205 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 245.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1965, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
6. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	89.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	190.880.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	334.677.442
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.455.057.442
III. HUTANG	Rp.	117.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.337.557.442

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.